

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Tumpa, Harifin, *Memahami Eksistensi Uang Pakda (Dwangsom) Dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cetakan V*, Yogyakarta, Purtaka, 2004.
- Bagong, Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2005.
- Basir, Cik, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2020.
- _____, *Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) Di Lingkungan Peradilan Agama*, Yogyakarta, Deepublish, 2015.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media, 2018.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Harsono, Boedi, *Tugas dan Kedudukan PPAT*, Jakarta, Majalah Hukum dan Pengembangan Universitas Indonesia, 1995.
- J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV Remadja Karya, 1989.
- J.A. Hehanussa, Deassy, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Winida Media Utama, 2023.
- Kholidah, dkk, *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, Yogyakarta, Semesta Aksara, 2023.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung, Mandar Maju, 2008.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2005.
- Marbun, S., *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 1998.
- Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'a*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006.
- A. Moegni Djojodirdjo, M., *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.
- Muliyadi, Lilik, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta, Djambatan, 2001
- Nasir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradya Paramitha, 1993.
- Peranginangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2007.
- _____, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Pustaka Ramadhan, Bandung, 2019.
- Salim, *Teknik pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Jakarta, Sinar Grafindo Persada, 2016
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007.
- Soeroso, R., *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Yahya Harahap, M., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Zuffran Sabrie, M., *Analisis Putusan Badan Peradilan Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam*, Departemen Agama R.I, Jakarta, 2001.

B. Jurnal

- Abdul Ghofur Anshori Priyambodo, Yogi. "Tinjauan terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Akta* 4, no. 3 (2017): 331-338. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA. 2017.
- Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *Lex Renaissance*. Vol. 2 No. 1. 2017.
- Darmawan, Ade, "Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (uang paksa) dalam Gugatan Perdata", *El-Iqtishady Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Fadhilah, Muhammad, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil dalam Putusan Peradilan Perdaya", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*
- Hamengku Aji Dewondaru Umar Ma'ruf, Raden, "Kajian Hukum Keharusan Bagi Notaris dan PPAT Yang Merangkap Jabatan Berkedudukan Dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja", *Jurnal Akta*, Volume 1, Nomor 2, 2017.
- Heriyanto, Bambang, "Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) di Peradilan Tata Usaha Negara", *Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021
- Komang Sukaarsana, I, "Pengaturan Dwangsom dan Penerapannya dalam Perkara Perdata di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trisakti*, 2020
- Kumala Sari, Putri, "Penerapan Uang Paksa dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada Pejabat Tata Usaha Negara", *Jurnal Ius Civile*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar.
- Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris". *Officium Notarium*, Vol 1 No. 1. 2021.
- Munawir, "Implementasi Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom): Studi terhadap Putusan-putusan Hakim tentang Uang Paksa (Dwangsom) di Pengadilan Negeri Ponorogo", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Putra Erwin, Yanuar, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Eksekusi dalam Pengadilan Hubungan Industrial", *Jurnal Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2015.
- Safiulloh dan Rouli Anita Velentina, berjudul "Pertanggungjawaban Hukum PPAT Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Pegawainya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Blt)", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 6, No.2, 2022.

Simanjuntak, Enrico, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, 2019.

Wahyu Wikanto, Adityo, dkk, “Eksekusi Riil dalam Perkara tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah”, *Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2, No. 2, 2014.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Eka Febriana, Cinsy, “Pertanggungjawaban PPAT Sebagai Turut Tergugat Atas Obyek Jual Beli Berstatus Sita Jaminan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pdt.G/2017/Pn/Pwk)”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2019.

Gusmi, G., “Akibat Hukum Pembatalan Akta PPAT oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 177K/Pdt/2006)”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

D. Internet

Abi Nugraha, Helmy, “Pembuktian dalam Hukum Perdata”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-batam/baca-artikel/16467/Pembuktian-dalam-Hukum-Perdata>, (diakses tanggal 24 Januari 2024).

Akmal Adicahya, “Menelusur Hukum Acara Perdata di Indonesia”, badilag.mahkamahagung.go.id, (diakses tanggal 9 Oktober 2023).

Bakri, “Responden Penelitian: Karakteristik dan Syaratnya”. <https://bakri.uma.ac.id/responden-adalah-subjek-atau-orang-yang/>, (diakses pada tanggal 9 Agustus 2022).

Geonestri Ramlan, Prilla, “Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, (diakses pada tanggal 24 Januari 2024).

Hasanah, Sovia, “Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium-lt5915144389920>, (diakses tanggal 14 Maret 2023).

Hasim, “Ex Offecio Sebuah Kehormatan”, <https://www.pa-semarang.go.id/id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/486-ex-offecio-sebuah-kehormatan>, (diakses pada 10 Juni 2025).

Nofriandi, Pepy, “Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>, (diakses tanggal 25 Oktober 2023).

Pandu, “Sumber Hukum: Pengertian, Sejarah dan Jenisnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/sumber-hukum/>, (diakses pada tanggal 24 Januari 2024).

- Rahmadi, Takdir, “Sistem Kamar dalam Mahkamah Agung: Upaya Memabangun Kesatuan Hukum”.
<https://www.mahkamahagung.go.id/en/articles/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh>, (diakses tanggal 3 Juli 2022).
- Syukri, M., “Urgensi Penerapan Dwangsom”,
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/>, (diakses pada 28 November 2024).

E. Peraturan Perundang-Undangan

Reglement Acara Perdata.

Herzian Inlandsch Reglement) HIR.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP Tentang PPAT).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Perka BPN Tentang Pendaftaran Tanah).